

UMKM Dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

I Putu Agus Suprima Cahyana¹, I Gede Panji Satria Permana²

^{1,2}Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Kabupaten Bangli - Indonesia

Kata Kunci: UMKM, pemberdayaan ekonomi lokal, digitalisasi, sinergi komunitas, kebijakan pemerintah.

Keywords:
e-commerce, consumer behavior, online transactions, impulsive buying, literature review

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memanfaatkan potensi lokal secara langsung, *UMKM* menjadi ujung tombak dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara deskriptif peran *UMKM* dalam pemberdayaan ekonomi lokal, tantangan utama yang dihadapi, serta efektivitas program pemerintah dan lembaga terkait dalam mendukung pengembangan sektor ini. Kajian dilakukan melalui metode *library research* dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal akademik, dan sumber relevan lainnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa *UMKM* berkontribusi besar dalam peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi wilayah. Namun demikian, *UMKM* juga menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti akses permodalan yang terbatas, rendahnya literasi digital, keterbatasan inovasi, serta daya saing produk yang masih lemah. Program pelatihan, pendampingan, dan kebijakan afirmatif yang telah diterapkan pemerintah menunjukkan dampak positif, terutama ketika diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi digital seperti *digital marketing*, *e-commerce*, dan platform daring. Selain itu, sinergi antara *UMKM*, komunitas lokal, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal. Artikel ini menyimpulkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis *UMKM* secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in driving local economic growth in Indonesia. As a sector that absorbs a large number of workers and directly utilizes local potential, MSMEs serve as the spearhead in achieving economic self-reliance for communities. This article aims to descriptively examine the role of MSMEs in local economic empowerment, the main challenges they face, and the effectiveness of government programs and related institutions in supporting the development of this sector. The study was conducted using a library research method by reviewing various scientific literature, academic journals, and other relevant sources. The findings indicate that MSMEs make significant contributions to increasing income, creating employment opportunities, and reducing regional economic disparities. However, MSMEs also face various structural obstacles, such as limited access to capital, low digital literacy, limited innovation, and weak product competitiveness. Training programs, mentoring, and affirmative policies implemented by the government have shown positive impacts, especially when integrated with the use of digital technologies such as digital marketing, e-commerce, and online platforms. Moreover, synergy between MSMEs, local communities, and local governments is a key factor in creating an inclusive, adaptive, and locally-driven economic ecosystem. This article concludes by emphasizing the importance of cross-sector collaboration in sustainably strengthening MSME-based economic empowerment

Copyright ©2025. UHN IGB Sugriwa Denpasar. All rights reserved.

Pendahuluan

Perekonomian daerah menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di tengah dinamika globalisasi dan persaingan pasar yang semakin kompleks, penguatan ekonomi lokal menjadi strategi yang relevan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu elemen strategis dalam penguatan ekonomi lokal adalah keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*), yang telah terbukti mampu menyerap tenaga kerja secara masif, mendorong inovasi berbasis potensi lokal, serta meningkatkan daya saing ekonomi daerah. *UMKM* memainkan peran sentral sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat karena kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan serta kedekatannya dengan karakteristik lokal.

Tantangan yang dihadapi *UMKM* dalam berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal sangat beragam, mulai dari keterbatasan akses permodalan, keterbatasan pengetahuan teknologi dan manajerial, hingga minimnya daya saing produk di pasar yang lebih luas. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan *UMKM*, tidak hanya dari sisi kebijakan, tetapi juga dari sisi pendampingan, pelatihan, serta integrasi teknologi informasi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *community empowerment*, yang menitikberatkan pada partisipasi aktif pelaku usaha dalam merancang dan menjalankan strategi pemberdayaan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, *UMKM* tidak hanya diposisikan sebagai entitas bisnis semata, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan budaya yang mampu mendorong kemandirian komunitas. Proses pemberdayaan ini melibatkan peningkatan kapasitas individu dan kelompok, penguatan jejaring antar pelaku usaha, serta akses terhadap pasar yang lebih luas melalui pemanfaatan teknologi digital. Seperti yang dikemukakan oleh Tohari et al. (2025), pemberdayaan ekonomi lokal melalui pendampingan *digital marketing* kepada pelaku *UMKM* terbukti dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing produk lokal, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis komunitas di daerah Jatirejo. Pendampingan berbasis teknologi ini menjadi langkah strategis dalam mengatasi kesenjangan informasi dan akses pasar yang selama ini menjadi kendala utama *UMKM*.

Lebih lanjut, pendekatan pemberdayaan yang berbasis potensi lokal juga terbukti efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Syadzali (2020) menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal melalui model pemberdayaan berbasis produksi kopi lokal di wilayah Muria mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, sekaligus memperkuat identitas lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam model ini, pelaku *UMKM* tidak hanya dibina dalam aspek produksi dan pemasaran, tetapi juga diberikan ruang untuk berinovasi dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan lingkungan sekitar.

Transformasi digital juga memberikan peluang besar dalam mengakselerasi pemberdayaan *UMKM*. Adopsi teknologi informasi dalam proses bisnis *UMKM* membuka akses terhadap pasar yang lebih luas, mempercepat proses produksi, serta memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen secara *real-time*. Di sisi lain, transformasi ini juga menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam hal literasi digital maupun manajemen usaha. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pengembangan kebijakan yang lebih responsif, program pendampingan yang lebih tepat sasaran, serta pemanfaatan teknologi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Pemberdayaan ekonomi lokal melalui *UMKM* juga berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Dengan mendorong pertumbuhan usaha di daerah, distribusi pendapatan menjadi lebih merata, dan peluang kerja lokal semakin terbuka. Selain itu, *UMKM* juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial karena mampu menggerakkan roda perekonomian secara inklusif. Dalam konteks inilah, peran *UMKM* tidak dapat dipandang sebelah mata, karena memiliki implikasi langsung terhadap pembangunan yang adil dan merata. Pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan *UMKM* merupakan langkah strategis dalam mencapai kemandirian ekonomi daerah. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Sinergi antara teknologi, budaya lokal, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi yang inklusif dan resilien terhadap perubahan global. Artikel ini akan mengkaji lebih lanjut bagaimana peran *UMKM* dapat dioptimalkan dalam kerangka pemberdayaan ekonomi lokal, serta strategi apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi tantangan yang dihadapi di lapangan.

1. Tijauan Pustaka

- A. Teori Pemberdayaan Komunitas Berbasis Inklusi Ekonomi (Community Economic Empowerment Theory)
Teori ini menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sebagai strategi dalam pembangunan lokal, dengan fokus pada akses inklusif terhadap sumber daya ekonomi seperti modal,

pelatihan, dan pasar. Salah satu pendekatannya adalah *asset-based community development* (ABCD), yang menekankan pemanfaatan aset dan potensi lokal sebagai kekuatan pemberdayaan. Menurut Mathie dan Cunningham (2010), pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan efektif apabila dimulai dari penguatan sumber daya lokal dan dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan pelaku *UMKM* sebagai aktor utama pembangunan. Mathie dan Cunningham (2010) menjelaskan bahwa pendekatan berbasis aset merupakan dasar bagi penguatan komunitas untuk mengelola pengembangan ekonomi secara berkelanjutan dan mandiri.

B. Teori Entrepreneurial Ecosystem (Ekosistem Kewirausahaan)

Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan *UMKM* dan kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan (*ecosystem*) yang mencakup regulasi, akses permodalan, budaya inovasi, pendidikan, dan dukungan teknologi. Isenberg (2011) menyatakan bahwa kewirausahaan tidak tumbuh dalam ruang hampa, tetapi bergantung pada kualitas sistem yang mendukungnya secara menyeluruh. Ekosistem kewirausahaan sangat relevan untuk konteks lokal karena dapat dikembangkan secara spesifik sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dalam hal ini, penguatan *UMKM* sebagai bagian dari ekosistem menjadi kunci bagi pemberdayaan ekonomi lokal. Isenberg (2011) menekankan pentingnya membangun ekosistem kewirausahaan untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil secara berkelanjutan dan dinamis.

C. Teori Social Capital dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Teori *social capital* modern melihat jejaring sosial, kepercayaan antar pelaku usaha, dan norma sosial sebagai modal penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Menurut Aldrich dan Meyer (2015), *social capital* sangat penting dalam konteks *UMKM*, karena banyak pelaku usaha mikro bergantung pada relasi sosial untuk memperoleh dukungan modal, informasi, dan pasar. Keterlibatan komunitas lokal dan pembentukan jaringan kolaboratif antara pelaku *UMKM*, pemerintah, dan akademisi menjadi pondasi bagi tumbuhnya ekonomi lokal berbasis solidaritas dan partisipasi. Aldrich dan Meyer (2015) menunjukkan bahwa *social capital* memainkan peran penting dalam ketahanan ekonomi lokal dan kemampuan komunitas untuk pulih dari tantangan ekonomi.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran *UMKM* dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Sumber yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang berhubungan dengan ekonomi lokal dan pengembangan *UMKM*. Melalui metode ini, diperoleh berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris yang dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan argumentasi serta menyusun kerangka analisis artikel. *Library research* memungkinkan peneliti untuk menelaah bagaimana peran *UMKM* telah dibahas dalam berbagai konteks, serta untuk mengidentifikasi pola-pola keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan ekonomi di tingkat lokal. Penekanan utama dalam metode ini adalah analisis kritis terhadap literatur yang sudah ada untuk membangun sintesis pemahaman yang sistematis dan argumentatif, yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan kesimpulan serta rekomendasi konseptual yang aplikatif dalam konteks pengembangan *UMKM* dan ekonomi lokal.

3. Hasil dan pembahasan

A. Peran Strategis *UMKM* dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Tingkat Lokal

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Keberadaan *UMKM* secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja, serta pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Peran ini semakin signifikan dalam konteks daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap industri besar atau sektor ekonomi formal lainnya. Dengan karakteristik usaha yang fleksibel dan berbasis pada potensi lokal, *UMKM* mampu menjangkau sektor-sektor ekonomi yang bersifat inklusif dan memberdayakan.

Kontribusi utama *UMKM* terhadap pendapatan masyarakat terlihat dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan modal yang relatif rendah. Banyak pelaku usaha memulai bisnis dari skala rumah tangga dan kemudian berkembang menjadi unit ekonomi yang mandiri. Model usaha seperti ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan, tetapi juga menciptakan stabilitas ekonomi bagi keluarga di tingkat komunitas. Menurut Gobal dan Allo (2024), keberadaan *UMKM* di desa terbukti mampu menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat, terutama melalui pemberdayaan potensi sumber daya lokal seperti hasil pertanian, kerajinan tangan, dan makanan olahan. Dalam hal ini, *UMKM* tidak hanya

menjadi penopang ekonomi, tetapi juga alat transformasi sosial yang menjadikan masyarakat lebih produktif dan mandiri.

UMKM juga memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Unit usaha berskala mikro hingga kecil sangat bergantung pada tenaga kerja lokal, baik dari keluarga sendiri maupun lingkungan sekitar. Pola ini menciptakan mata rantai produksi yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemasok bahan baku, tenaga kerja produksi, hingga distributor. Peningkatan volume usaha *UMKM* akan mendorong meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga memberikan peluang kerja yang luas, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan pendidikan formal. Perdana (2024) menyebutkan bahwa *UMKM* merupakan fondasi ekonomi lokal yang dapat menekan tingkat pengangguran, karena mampu membuka peluang kerja di sektor informal yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Di sisi lain, peran *UMKM* juga terletak pada kemampuannya mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau pusat industri besar, sementara wilayah pedesaan seringkali tertinggal. Melalui pengembangan *UMKM*, potensi ekonomi yang tersebar di berbagai daerah dapat diangkat dan dikembangkan secara optimal. Produk lokal yang unik, seperti makanan tradisional, kain tenun, atau kerajinan khas, dapat memiliki nilai jual tinggi apabila dikelola secara profesional. Peningkatan pendapatan masyarakat desa akan berdampak pada perputaran ekonomi lokal yang lebih merata dan berkelanjutan.

Transformasi digital juga memperkuat peran strategis *UMKM* dalam perekonomian lokal. Pemanfaatan teknologi informasi membuka akses pasar yang lebih luas dan efisien, termasuk melalui platform *e-commerce*, media sosial, dan aplikasi keuangan digital. Menurut Annisa et al. (2023), adopsi *digital mindset* dalam kewirausahaan lokal mempercepat proses pemberdayaan ekonomi melalui efisiensi produksi, peningkatan visibilitas produk, serta akses terhadap peluang bisnis baru. Kemampuan adaptasi ini memungkinkan *UMKM* untuk bersaing di pasar yang lebih luas tanpa harus meninggalkan akar lokalitasnya. *UMKM* tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan berbasis masyarakat. Keberadaan *UMKM* menghubungkan antara potensi lokal, kreativitas individu, dan kebutuhan pasar dalam satu ekosistem yang dinamis. Peran strategis ini menjadikan *UMKM* sebagai instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah. Pemberdayaan yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memperkuat kontribusi *UMKM* terhadap pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkeadilan.

B. Tantangan Utama yang Dihadapi *UMKM* dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) dalam pembangunan ekonomi lokal telah diakui secara luas, namun keberadaan *UMKM* tidak lepas dari berbagai tantangan struktural yang menghambat proses pemberdayaan. Tantangan-tantangan ini bersifat sistemik dan kompleks, mencakup keterbatasan dalam akses permodalan, hambatan dalam adopsi teknologi, rendahnya literasi digital, serta lemahnya daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif. Hambatan-hambatan tersebut berdampak signifikan terhadap kinerja *UMKM*, baik dari segi produktivitas, efisiensi, maupun keberlanjutan usaha.

Akses permodalan menjadi tantangan paling mendasar yang kerap dihadapi oleh pelaku *UMKM*. Banyak usaha mikro dan kecil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal karena terbentur pada persyaratan administrasi, agunan, dan riwayat kredit yang tidak memadai. Kondisi ini menyebabkan pelaku *UMKM* sering bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal yang berbunga tinggi dan berisiko. Hambatan ini berdampak langsung pada kemampuan *UMKM* untuk melakukan ekspansi usaha, pembelian bahan baku dalam skala besar, atau pengembangan inovasi produk. Harahap et al. (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan permodalan menjadi penghalang utama dalam pengembangan skala usaha, yang kemudian berdampak pada lambatnya pertumbuhan sektor informal dalam pembangunan ekonomi kota.

Selain kendala finansial, keterbatasan dalam penggunaan teknologi juga menjadi hambatan serius dalam pemberdayaan *UMKM*. Masih banyak pelaku usaha yang mengandalkan proses produksi manual atau tradisional, yang kurang efisien dan memiliki keterbatasan dalam kapasitas produksi. Rendahnya akses terhadap mesin dan peralatan produksi modern menyebabkan produktivitas *UMKM* tidak mampu bersaing dengan produk-produk dari industri berskala besar. Dalam era yang ditandai oleh percepatan inovasi teknologi, kemampuan adaptasi terhadap perubahan menjadi kunci keberhasilan usaha. Ketertinggalan dalam aspek teknologi tidak hanya memengaruhi proses produksi, tetapi juga dalam hal pemasaran dan distribusi produk.

Rendahnya literasi digital turut memperparah kondisi *UMKM* di tengah tuntutan era digitalisasi. Transformasi digital membuka berbagai peluang pemasaran dan efisiensi operasional melalui *e-commerce*, media sosial, dan layanan keuangan digital. Namun, banyak pelaku *UMKM* yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Habib dan Sutopo (2024) menyoroti pentingnya pembinaan dalam aspek komunikasi pemasaran digital, terutama bagi pelaku usaha perempuan di kawasan wisata, yang masih kesulitan dalam mengelola akun digital untuk mempromosikan produk mereka. Rendahnya pemahaman terhadap strategi *digital marketing* membuat

banyak *UMKM* tertinggal dari pesaing yang lebih adaptif.

Tantangan lainnya adalah lemahnya daya saing produk *UMKM*, baik dari segi kualitas, desain, maupun standar kemasan. Produk *UMKM* seringkali belum mampu memenuhi standar pasar nasional, apalagi internasional. Kurangnya inovasi, terbatasnya akses terhadap pelatihan, dan tidak adanya riset pasar menjadi faktor utama penyebab rendahnya daya saing ini. Di samping itu, keterbatasan jaringan distribusi dan promosi membuat produk *UMKM* sulit dikenal oleh konsumen di luar wilayah produksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan ketergantungan pada pasar lokal dan mempersulit perluasan usaha ke wilayah yang lebih luas.

Keseluruhan tantangan struktural tersebut saling berkaitan dan menuntut pendekatan pemberdayaan yang bersifat holistik dan berkelanjutan. Diperlukan intervensi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta untuk membangun ekosistem pendukung *UMKM* yang tangguh dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Penguatan literasi digital, penyediaan akses pembiayaan inklusif, serta pelatihan keterampilan teknis dan manajerial menjadi elemen penting dalam strategi pemberdayaan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, *UMKM* dapat menjalankan peran strategisnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

C. Efektivitas Program Pemberdayaan *UMKM* oleh Pemerintah dan Lembaga Terkait

Program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga terkait menjadi upaya strategis dalam mendorong penguatan ekonomi lokal. Pemberdayaan ini umumnya diwujudkan melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, fasilitasi pemasaran, akses permodalan, serta kebijakan afirmatif yang mendukung keberlanjutan usaha. Evaluasi terhadap efektivitas program-program tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana intervensi kebijakan mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian *UMKM* dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan komponen utama dalam upaya pemberdayaan *UMKM*. Program pelatihan sering difokuskan pada peningkatan keterampilan produksi, manajemen usaha, literasi keuangan, serta adopsi teknologi digital. Melalui pelatihan yang berkelanjutan, pelaku *UMKM* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengelola keuangan secara profesional, dan memperluas akses pasar. Susanti et al. (2024) menekankan bahwa optimalisasi potensi lokal yang dikombinasikan dengan digitalisasi telah mendorong transformasi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat desa berbasis *UMKM*. Pelatihan yang diberikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti pengelolaan usaha berbasis potensi agribisnis, kuliner, dan kerajinan.

Selain pelatihan, program pendampingan juga memiliki peran penting dalam memastikan *UMKM* dapat ilmu yang telah diperoleh dalam kegiatan usahanya. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan monitoring, konsultasi, serta penguatan jejaring bisnis. Keberadaan pendamping atau fasilitator lapangan membantu pelaku *UMKM* mengatasi hambatan teknis dan administratif secara langsung, serta membangun rasa percaya diri dalam menjalankan usaha. Model pendampingan ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha, terutama bagi pelaku baru atau usaha mikro yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman manajerial. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis partisipatif dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan pendampingan yang berkelanjutan.

Kebijakan afirmatif juga menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan *UMKM*. Pemerintah melalui berbagai regulasi telah memberikan perlindungan dan insentif kepada *UMKM*, seperti kemudahan perizinan, pembebasan pajak bagi usaha mikro, serta alokasi khusus dalam pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan adil, agar *UMKM* memiliki kesempatan bersaing di tengah dominasi usaha berskala besar. Nugroho dan Andarini (2020) menjelaskan bahwa strategi pemberdayaan *UMKM* berbasis kearifan lokal menjadi penting di era transisi dari Industri 4.0 menuju Society 5.0, di mana teknologi dan nilai-nilai lokal harus berjalan seimbang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong integrasi teknologi dengan nilai-nilai budaya lokal sebagai kekuatan ekonomi.

Efektivitas program-program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Di beberapa daerah, pelatihan belum dilakukan secara berkesinambungan atau tidak disesuaikan dengan konteks lokal. Pendampingan usaha terkadang tidak menjangkau seluruh pelaku *UMKM*, terutama di wilayah terpencil. Selain itu, implementasi kebijakan afirmatif sering kali belum optimal akibat keterbatasan koordinasi lintas sektor dan rendahnya partisipasi publik dalam pengawasan program. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara konsep program pemberdayaan *UMKM* telah dirancang dengan baik, implementasinya masih membutuhkan penguatan dalam aspek teknis, anggaran, dan pengawasan. Program pemberdayaan *UMKM* oleh pemerintah dan lembaga terkait telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas usaha, digitalisasi, dan perluasan pasar. Efektivitas program akan semakin maksimal apabila

disertai dengan evaluasi berkala, peningkatan kualitas pelaksana, serta penguatan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang responsif dan pendekatan pemberdayaan yang kontekstual, *UMKM* dapat berkembang sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing.

D. Peran Teknologi Digital dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis UMKM

Perkembangan teknologi digital telah menjadi katalisator penting dalam mendorong transformasi sektor ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) di berbagai wilayah. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, pemanfaatan teknologi digital memberikan peluang strategis untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing produk lokal. Akses terhadap *digital marketing*, *e-commerce*, dan berbagai platform daring menjadi faktor pendorong bagi *UMKM* untuk terlibat lebih aktif dalam ekonomi digital, sehingga tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam ekosistem bisnis modern.

Salah satu pemanfaatan teknologi digital yang paling signifikan dalam konteks *UMKM* adalah *digital marketing*. Strategi pemasaran berbasis digital memungkinkan pelaku usaha untuk mempromosikan produk dan jasa melalui media sosial, situs web, dan platform periklanan daring. Dengan biaya yang relatif rendah dan jangkauan yang luas, *digital marketing* menjadi solusi efektif untuk meningkatkan visibilitas merek dan membangun hubungan langsung dengan konsumen. Kusuma et al. (2022) menunjukkan bahwa strategi *digital marketing* yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kesadaran pasar terhadap produk *UMKM*, serta mendorong pertumbuhan penjualan, terutama selama masa krisis seperti pandemi COVID-19. Melalui pendekatan ini, *UMKM* mampu menjangkau konsumen lintas wilayah tanpa perlu membangun jaringan distribusi fisik yang kompleks.

Selain pemasaran, pemanfaatan *e-commerce* juga telah mengubah cara *UMKM* menjalankan aktivitas bisnis. Platform *e-commerce* seperti marketplace nasional dan global menyediakan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memasarkan produk secara lebih luas. Sistem ini memungkinkan transaksi jual-beli dilakukan secara daring, dengan metode pembayaran dan pengiriman yang terintegrasi. Dengan adanya *e-commerce*, pelaku *UMKM* tidak lagi terbatas pada pasar lokal, melainkan dapat menjangkau konsumen di skala regional hingga internasional. Putrie et al. (2023) menyatakan bahwa pengembangan program pelatihan berbasis *e-commerce* terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, karena memberikan akses pasar yang lebih luas dan efisiensi distribusi yang lebih tinggi.

Selain dari aspek pemasaran dan distribusi, teknologi digital juga mendorong efisiensi dalam operasional *UMKM*. Penggunaan aplikasi manajemen keuangan, perangkat lunak akuntansi, hingga sistem pemantauan inventaris berbasis digital membantu pelaku usaha dalam mengelola kegiatan bisnis secara lebih terstruktur dan efisien. Inovasi teknologi ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, sehingga meningkatkan daya saing usaha di tengah pasar yang kompetitif. Digitalisasi proses usaha juga mempermudah pelaporan pajak, pemantauan arus kas, serta evaluasi kinerja secara real-time.

Dalam perspektif pembangunan lokal, pemanfaatan teknologi digital oleh *UMKM* turut mendukung pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inisiatif pemberdayaan yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas—sebagaimana dijelaskan dalam model *quadruple helix*—menjadi semakin efektif dengan adanya teknologi digital sebagai media kolaborasi. Muzaqi dan Hanum (2020) menggarisbawahi bahwa penerapan teknologi digital dalam ekosistem ekonomi lokal, terutama di wilayah desa wisata, mampu memperkuat keterhubungan antar-stakeholder dan mempercepat proses pengembangan potensi ekonomi lokal. Melalui integrasi ini, program pelatihan, promosi produk, serta pembinaan usaha dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terukur.

Pemanfaatan teknologi digital oleh *UMKM* masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil, serta kesenjangan pengetahuan antara pelaku usaha. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan serta dukungan dari berbagai pihak guna menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Teknologi digital memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal berbasis *UMKM*. Melalui pemanfaatan *digital marketing*, *e-commerce*, dan platform daring lainnya, *UMKM* mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta menjalankan usaha secara lebih efisien dan berkelanjutan. Transformasi ini membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi lokal yang modern, inklusif, dan terintegrasi dengan dinamika pasar global.

E. Sinergi UMKM, Komunitas Lokal, dan Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Ekosistem Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Penguatan ekosistem ekonomi lokal tidak dapat terlepas dari sinergi antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*), komunitas lokal, dan pemerintah daerah. Kolaborasi lintas aktor ini menjadi elemen kunci dalam membentuk sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan lokal. Setiap pihak memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam proses pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam memanfaatkan potensi lokal sebagai fondasi pembangunan. Peran *UMKM* sebagai motor penggerak ekonomi lokal tercermin dari kemampuannya menyerap tenaga kerja, mengelola sumber daya berbasis kearifan lokal, serta menciptakan nilai tambah

ekonomi di tingkat komunitas. Namun, agar potensi ini berkembang secara optimal, dibutuhkan dukungan yang kuat dari komunitas dan pemerintah daerah. Komunitas lokal berfungsi sebagai wadah sosial yang mengorganisir partisipasi masyarakat dalam mendukung aktivitas usaha, baik melalui konsumsi produk lokal, penyediaan bahan baku, maupun promosi berbasis komunitas. Keberpihakan masyarakat terhadap produk lokal menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan memperkuat ketahanan ekonomi wilayah.

Pemerintah daerah memegang peranan penting sebagai fasilitator dalam menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan *UMKM*. Kebijakan afirmatif seperti penguatan regulasi, pemberian insentif, kemudahan perizinan, serta penyediaan infrastruktur pendukung menjadi bentuk intervensi yang berdampak langsung terhadap perkembangan usaha lokal. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan usaha, dan pendampingan sertifikasi mutu turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor *UMKM*. Indah et al. (2025) mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelibatan lintas sektor menjadi strategi utama dalam meningkatkan kinerja ekonomi lokal, khususnya di wilayah Surabaya.

Kolaborasi yang terstruktur dan berbasis kebutuhan lokal menjadikan sinergi antar aktor berjalan lebih efektif. Pemerintah dapat mendorong terbentuknya forum komunikasi atau kelembagaan lokal yang menghubungkan pelaku usaha dengan komunitas dan pemangku kepentingan lain, seperti akademisi dan dunia industri. Kehadiran forum semacam ini memperkuat koordinasi antar pihak dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang berpihak pada pengembangan potensi daerah. Dalam praktiknya, pendekatan berbasis partisipasi juga mendorong lahirnya inovasi sosial dan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik lokal. Selain kebijakan dan partisipasi komunitas, pendampingan teknis juga menjadi instrumen penting dalam sinergi pemberdayaan. Salah satu bentuk konkret adalah pendampingan dalam proses sertifikasi produk, baik dari sisi legalitas usaha, keamanan pangan, maupun sertifikasi halal. Qomaro et al. (2019) mencatat bahwa pendampingan yang dilakukan terhadap pelaku *UMKM* sektor pangan di Kecamatan Tragah, Bangkalan, berhasil meningkatkan kualitas produk serta membuka akses pasar yang lebih luas, khususnya bagi konsumen muslim. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga memperkuat kepercayaan konsumen terhadap kualitas *UMKM* lokal.

Sinergi yang ideal adalah sinergi yang mampu menciptakan ekosistem usaha yang responsif terhadap perubahan, seperti perkembangan teknologi, perubahan preferensi pasar, maupun tantangan global seperti krisis ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi yang tidak bersifat formalitas, melainkan bersandar pada kebutuhan riil dan aspirasi pelaku *UMKM*. Dalam konteks ini, peran komunitas digital, lembaga pendidikan, dan media juga berkontribusi dalam memperluas jangkauan informasi, pengetahuan, dan promosi usaha lokal. Penguatan ekosistem ekonomi lokal tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara *UMKM*, komunitas lokal, dan pemerintah daerah harus dibangun secara kolaboratif dan berorientasi pada keberlanjutan. Ketika ketiganya berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pemberdayaan, maka potensi lokal dapat dioptimalkan menjadi kekuatan ekonomi yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi ini akan melahirkan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berdaya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan.

4. Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (*UMKM*) memegang peran vital dalam memperkuat fondasi perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Dalam proses pemberdayaan, *UMKM* dihadapkan pada berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya literasi digital, kurangnya inovasi produk, serta lemahnya daya saing. Pemerintah dan lembaga terkait telah menjalankan berbagai program pelatihan, pendampingan, serta kebijakan afirmatif untuk memperkuat kapasitas usaha dan keberlanjutan *UMKM*. Pemanfaatan teknologi digital melalui digital marketing, e-commerce, dan platform daring terbukti efektif dalam memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi usaha. Selain itu, sinergi antara *UMKM*, komunitas lokal, dan pemerintah daerah menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor berbasis potensi lokal menjadi strategi yang harus terus diperkuat dalam mendorong kemandirian dan kedaulatan ekonomi masyarakat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, diperlukan langkah-langkah strategis dan terukur guna memperkuat posisi *UMKM* dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

1. Peningkatan Literasi Digital dan Inovasi Produk

Perlu dikembangkan program pelatihan intensif dan berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pemanfaatan teknologi digital dan inovasi berbasis lokalitas.

2. Akses Permodalan yang Inklusif

Pemerintah daerah dan lembaga keuangan diharapkan memperluas skema pembiayaan yang mudah diakses oleh *UMKM*, termasuk penguatan program kredit usaha rakyat berbasis karakter dan potensi usaha.

3. Optimalisasi Pendampingan Berbasis Kebutuhan Lokal

Program pendampingan sebaiknya dirancang berdasarkan hasil pemetaan potensi dan tantangan spesifik di setiap wilayah, serta melibatkan fasilitator dari komunitas setempat yang memahami kondisi sosial ekonomi lokal.

4. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Dibutuhkan forum atau kelembagaan sinergis yang menghubungkan pelaku *UMKM*, komunitas lokal, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk merancang program pemberdayaan yang terukur dan berkelanjutan.

5. Transformasi Ekonomi Digital Daerah

Pemerintah daerah perlu mengembangkan infrastruktur teknologi dan platform digital lokal yang memfasilitasi pemasaran produk *UMKM*, disertai dengan kebijakan perlindungan dan promosi produk lokal unggulan.

Daftar Rujukan

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Annisa, R., Sabaruddin, R., Rahayuningsih, P. A., & Winnarto, M. N. (2023). Pemanfaatan Transformasi Digital Mindset Dalam Kewirausahaan Ukm Untuk Pengembangan Ekonomi Lokal. *Sorot: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 78-81.
- Gobal, R., & Allo, Y. T. (2024). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Bulletin Of Community Engagement*, 4(2), 233-238.
- Habib, M. A. F., & Sutopo, S. (2024). Pembinaan Ukm Dalam Aspek Komunikasi Pemasaran Sebagai Wujud Pemberdayaan Perempuan Di Sekitar Kawasan Wisata Pantai. *Journal Of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling And Creative Economy*, 4(1), 85-100.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Peranan Ukm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 6(2), 718-728.
- Indah, C. L., Alfarizi, R., & Wahjono, S. I. (2025). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Di Ukm Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 5(2), 130-136.
- Isenberg, D. J. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship. *Babson Entrepreneurship Ecosystem Project*, Babson College.
- Kusuma, V. A., Sahabuddin, Z. A., & Kennedy, P. S. J. (2022). Strategi Digital Marketing Pada Usaha Mikro Dan Menengah (Ukm) Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Pendekatan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Cafetaria*, 3(1), 24-35.
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2010). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 20(4-5), 474-486. <https://doi.org/10.1080/09614521003790995>
- Muzaqi, A. H., & Hanum, F. (2020). Model Quadruple Helix Dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata Di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 673-691.
- Nugroho, R. H., & Andarini, S. (2020). Strategi Pemberdayaan Ukm Di Pedesaan Berbasis Kearifan Lokal Di Era Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Bisnis Indonesia*, 1(01).
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun Ekonomi Lokal Berbasis Ukm*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Putrie, R. A., Arifuddin, A., Ni'amah, M., Putri, S. K., & Iffah, N. (2023). Pengembangan Program Pelatihan Keterampilan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7554-7560.
- Qomaro, G. W., Hammam, H., & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 5(2), 137-142.
- Susanti, R., Faye, D. A. P., Putri, N. D., Agustin, M., Maftukhah, N. Z., Sari, I. P., ... & Utama, R. N. (2024). Optimalisasi Potensi Lokal Dan Digitalisasi Ukm Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Of Human And Education (Jahe)*, 4(5), 600-611.

- Syadzali, M. M. (2020). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada Ukm Pembuat Kopi Muria). *Syntax*, 2(5).
- Tohari, A., Faisol, F., Fauzi, D. A. S., Prayogy, M. D., & Khoiriyah, W. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Pendampingan Digital Marketing Untuk Umkm Jatirejo. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1-9.